



LAPORAN

SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

PERIODE JANUARI - MEI 2023



Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110 | PO.Box 999 JKT 10000
Telepon: (021) 2352-9000 | Faks. (021) 352-0177



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Praktik tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi fokus pemerintah dalam meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik diantaranya dapat dilakukan dengan meminimalkan terjadinya korupsi; pandangan minoritas terwakili dan dipertimbangkan; serta pandangan dan pendapat kaum yang paling lemah didengarkan dalam pengambilan keputusan. Sampai dengan saat ini, korupsi menjadi fenomena yang masih melekat di instansi pemerintahan. Oleh karenanya, banyak upaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menekan korupsi di instansi pemerintahan. Hal ini dapat dilihat mulai dari ditetapkannya Peraturan Presiden tentang strategi nasional pencegahan korupsi, pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, sampai dengan diterbitkannya SNI tentang Sistem Manajemen Anti Penyusapan ISO 37001 oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Oleh karena pentingnya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka setiap K/L/D diharuskan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh instansi pemerintah dapat diterapkan melalui Persepsi Anti Korupsi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang akan menghasilkan nilai indeks persepsi anti korupsi. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi merupakan hasil survei kuantitatif terhadap stakeholders yang terkait dengan suatu instansi tentang tingkat korupsi yang terjadi pada instansi tersebut.

Mahkamah Konstitusi selaku lembaga tinggi negara juga wajib mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk itu, pada tahun ini dilakukan pengukuran persepsi anti korupsi melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada lingkungan Mahkamah Konstitusi. Selain untuk mencegah dan memberantas korupsi, Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) juga merupakan bagian dari perwujudan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2. Tujuan

Kegiatan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) bertujuan untuk:

- a. Mengukur nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK);
- b. Sebagai bahan pengambil kebijakan, untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- c. Mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Jakarta, 24 Mei 2023
Sekretaris Jenderal



Digital Signature
[mk1379257798230524110156](https://www.mahkamahkonstitusi.go.id/signature/mk1379257798230524110156)



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Variabel Survei

Variabel Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) meliputi:

1. Diskriminasi pelayanan

Petugas memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya.

2. Kecurangan pelayanan

Petugas memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan, seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan diluar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll.

3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Petugas menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transportasi, rokok, kopi, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transportasi, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan.

4. Pungutan liar

Petugas melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi (Pungli bisa dikamufleskan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi", "uang rokok", "uang terima kasih", dsb)

5. Percaloan

Praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai)

B. Kriteria Responden

Responden adalah seluruh pihak yang pernah mendapatkan pelayanan di unit ini. Jumlah responden yang digunakan dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini dihitung menggunakan rumus Krejcie sebagai berikut:





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Rumus Krejcie:

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Keterangan

S = Jumlah sampel

λ^2 = Lamda (faktor pengali) dengan dk = 1, (taraf kesalahan yang digunakan 5%, sehingga nilai lamda 3,841)

N = Populasi sebanyak 35

P = Q = 0,5 (populasi menyebar normal)

d = 0,05

Sehingga dari perhitungan di atas, jumlah responden minimal yang harus diperoleh adalah 33 responden.

C. Metode Pencacahan

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei elektronik melalui sistem broadcast data. Broadcast data dilakukan melalui WhatsApp, SMS, Email, dan scan barcode.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

1. Jenis Layanan

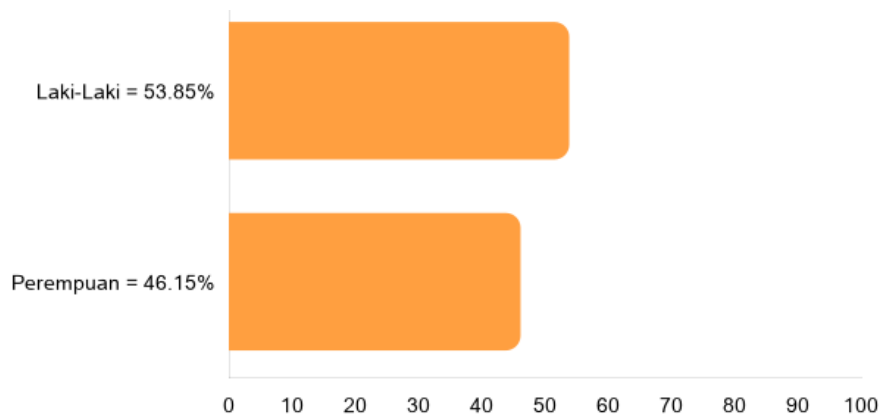
Berikut merupakan jenis layanan yang diperoleh dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK):

No	Jenis Pelayanan	Jumlah	Persentase Responden
1	Pelayanan Pendaftaran Liputan Pers	9	17.31%
2	Pelayanan Program Kerja Sama Dalam Negeri	26	50%
3	Pelayanan Pendaftaran dan Penerimaan Kunjungan	17	32.69%
	Total	52	100%

2. Profil Responden

Berikut merupakan karakteristik responden yang diperoleh dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK):

2.1. Jenis Kelamin



Gambar 1. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

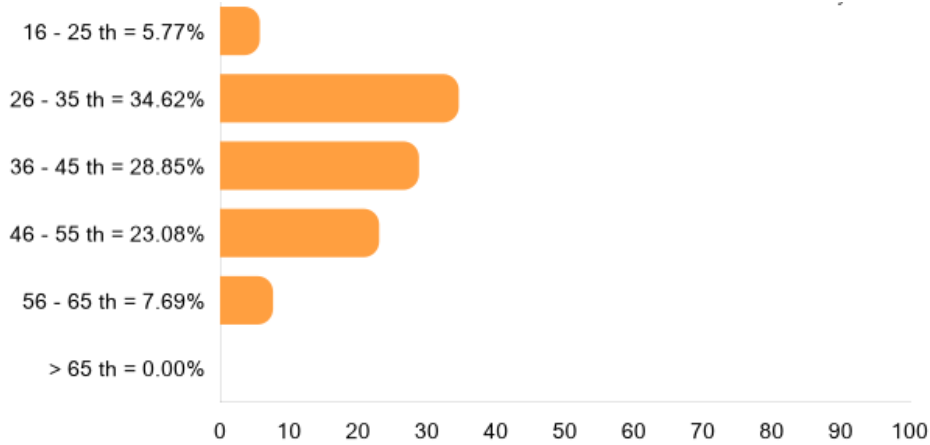




MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

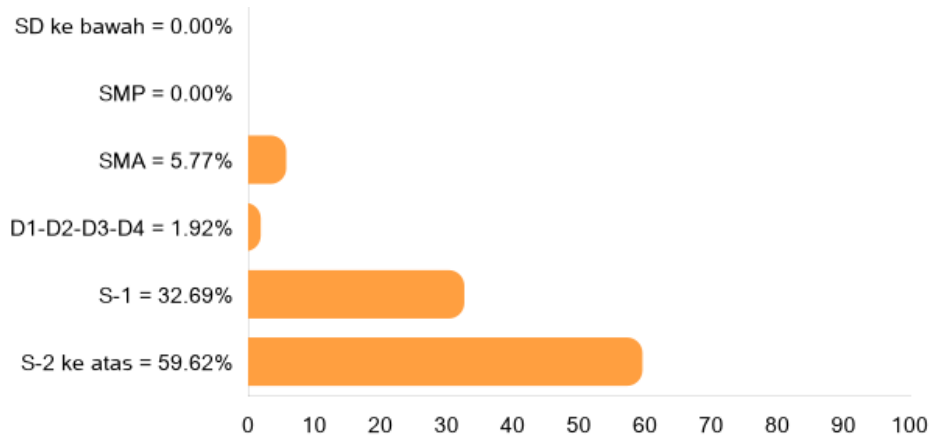
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.2. Umur



Gambar 2. Persentase Responden Berdasarkan Umur

2.3. Pendidikan Terakhir



Gambar 3. Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

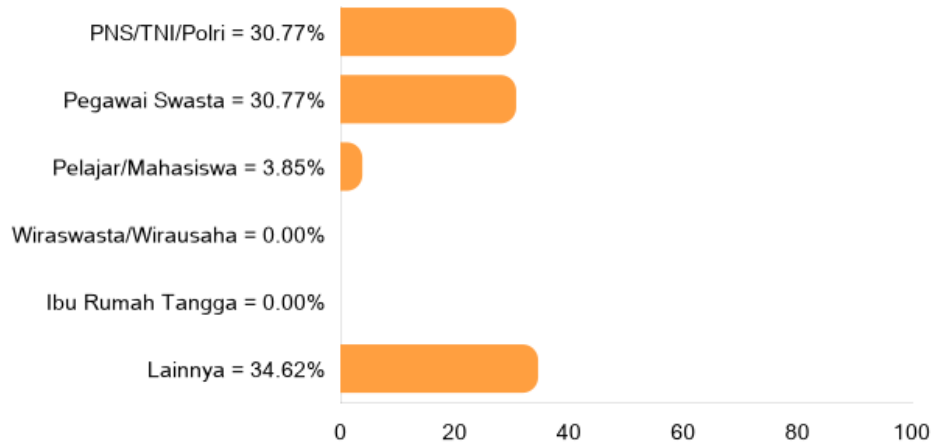




MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2.4. Pekerjaan Utama



Gambar 4. Persentase Responden Berdasarkan Pekerjaan Utama

Tabel 1. Persentase Responden pada Pekerjaan Utama Lainnya

No	Pekerjaan Utama Lainnya
1	Dosen
2	wartawan
3	Pengajar
4	Jurnalis/Karyawan BUMN
5	Mahasiswa
6	perangkat desa
7	Advokat
8	Walinagari Pasia Laweh
9	Jurnalis
10	Constitutional Lawyer





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

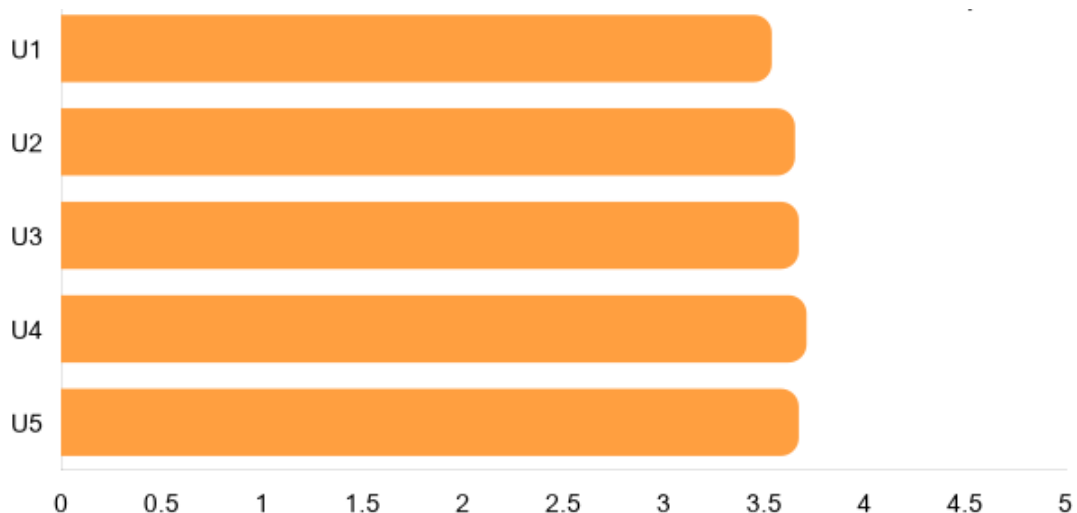
3. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol mendapatkan nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi sebesar **3.65**, dengan predikat **Sangat Baik**. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut didapat dari nilai rata-rata seluruh unsur pada tabel berikut.

Tabel 2. Nilai Unsur Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

No	Unsur	Indeks	Kategori
1	U1. Diskriminasi pelayanan	3,538	Sangat Baik
2	U2. Kecurangan pelayanan	3,654	Sangat Baik
3	U3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi	3,673	Sangat Baik
4	U4. Pungutan liar	3,712	Sangat Baik
5	U5. Percaloan	3,673	Sangat Baik
	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,65	Sangat Baik
	Nilai Konversi	91,25	Sangat Baik

Nilai unsur Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol apabila diurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai terendah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 5. Grafik Unsur Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol





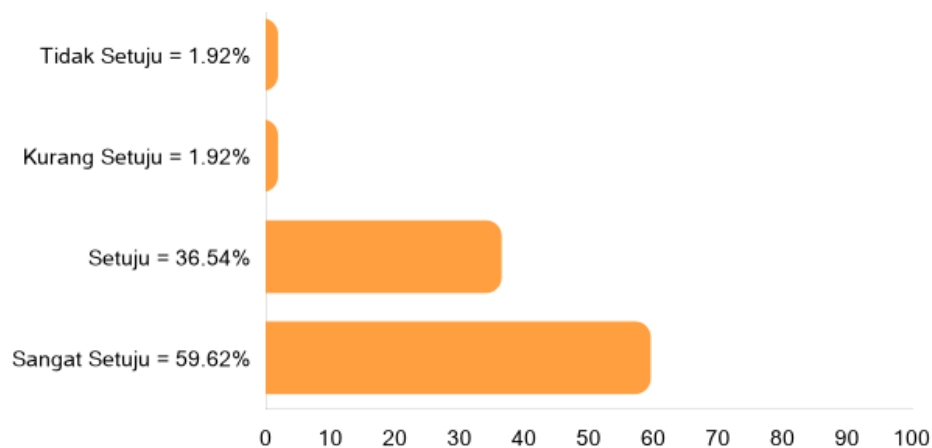
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

4. Pembahasan Unsur

Unsur yang dipakai dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui predikat anti korupsi pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. Berikut adalah pembahasan mengenai jumlah persentase persepsi responden di setiap unsur:

4.1. U1. Diskriminasi pelayanan



Gambar 5. Grafik Unsur Diskriminasi pelayanan

Tabel 3. Persentase Responden pada Unsur Diskriminasi pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	1	1,92 %
2	Kurang Setuju	1	1,92 %
3	Setuju	19	36,54 %
4	Sangat Setuju	31	59,62 %
	TOTAL	52	100 %





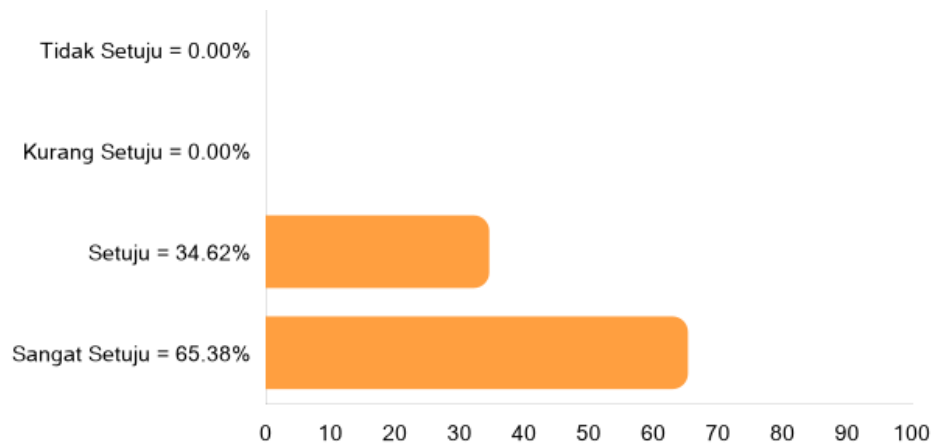
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Alasan yang diberikan responden pada unsur Diskriminasi pelayanan:

- Resepsionis cuek sama wartawan. Satpam pelayanan maksimal
- Karena biro telah bekerjasama dengan desa dan masyarakat

4.2. U2. Kecurangan pelayanan



Gambar 6. Grafik Unsur Kecurangan pelayanan

Tabel 4. Persentase Responden pada Unsur Kecurangan pelayanan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	18	34,62 %
4	Sangat Setuju	34	65,38 %
	TOTAL	52	100 %

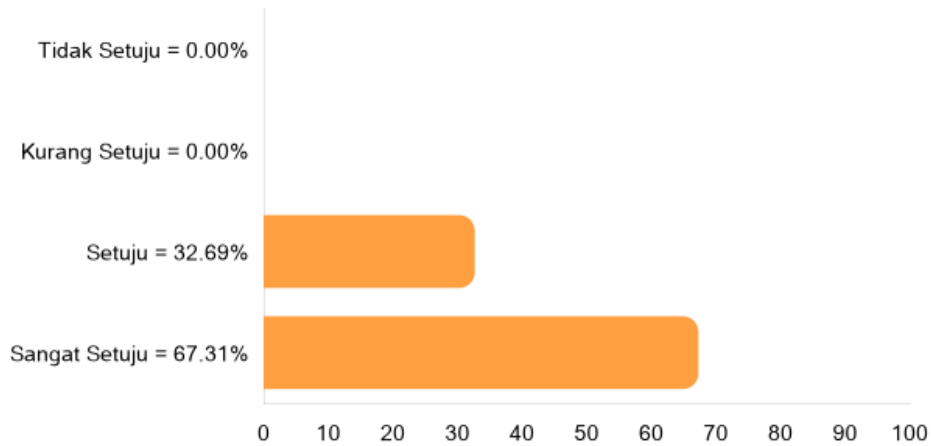




MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.3. U3. Menerima imbalan dan/atau gratifikasi



Gambar 7. Grafik Unsur Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

Tabel 5. Persentase Responden pada Unsur Menerima imbalan dan/atau gratifikasi

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	17	32,69 %
4	Sangat Setuju	35	67,31 %
	TOTAL	52	100 %

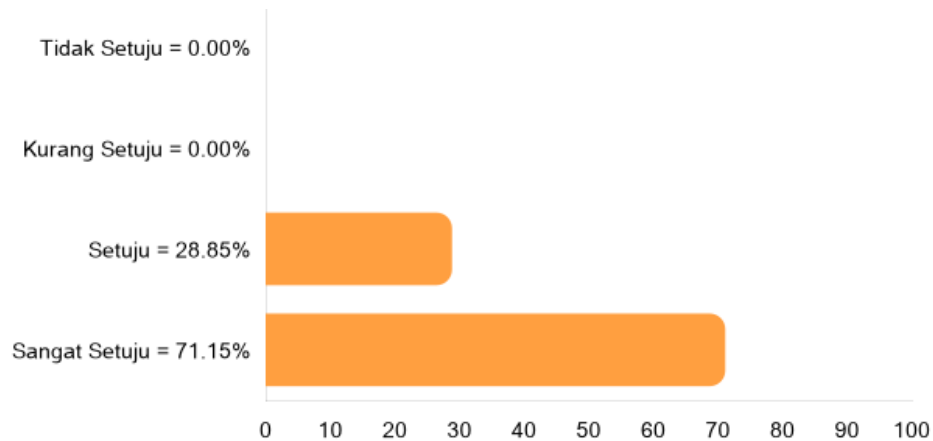




MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.4. U4. Pungutan liar



Gambar 8. Grafik Unsur Pungutan liar

Tabel 6. Persentase Responden pada Unsur Pungutan liar

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	15	28,85 %
4	Sangat Setuju	37	71,15 %
	TOTAL	52	100 %

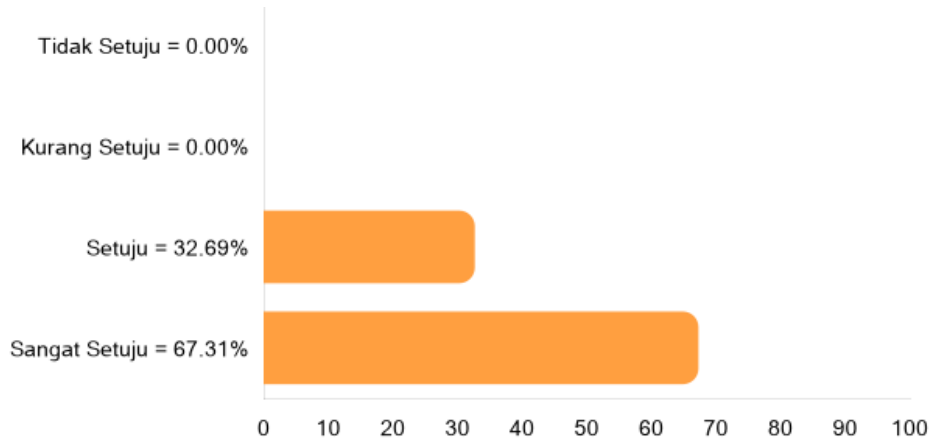




MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

4.5. U5. Percaloan



Gambar 9. Grafik Unsur Percaloan

Tabel 7. Persentase Responden pada Unsur Percaloan

No	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Tidak Setuju	0	0,00 %
2	Kurang Setuju	0	0,00 %
3	Setuju	17	32,69 %
4	Sangat Setuju	35	67,31 %
	TOTAL	52	100 %

5. Saran Responden

Saran responden mengenai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai berikut:

No	Saran
1	Smg MK betul2 independen





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

2	Semoga MK RI semakin berkualitas melayani masyarakat.
3	Mohon tingkagkan respon dengan cepat
4	dilanjutkan dan ditingkatkan
5	Alangkah baiknya pelayanan lebih ditingkatkan, terutama dari sisi efisien waktu.
6	sudah cukup baik untuk mengetahui indeks persepsi anti korupsi.
7	Lanjutkan Luuuurrrr.... Pokok ora ono suap, pungli, dan semacamnya.... yo aman taaaa.... Yo gak bahaya ta
8	Semoga tahun tahun berikut nya MK RI tetap bs memberikan pelayanan kunjungan atau studi banding utk mahasiswa
9	Tingkat layanan kepada masyarakat terutama dalam memberikan pemahaman tentang konstitusi
10	lebih ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya.
11	Peningkatan responsivitas dari form online akan sangat membantu
12	Pelayanan lebih ditingkatkan lagi. terimakasih.
13	Pelayanan excellent.
14	Saya kira setuju untuk dilakukan survei karena hasil survei menunjukkan bahwa di Biro Humas tidak ada halhal yang patut diduga terjadi penyalahgunaan wewenang, sehingga barangkali survei ini dapat dilakukan rutin minimal tiga bulan sekali
15	Mohon dipertahankan dan ditingkatkan komitmen pelayanan tanpa korupsi
16	Terus tingkatkan pelayanan
17	Semoga kualitas tetap terjaga dan selalu menjaga integritas yang sudah dibangun sejauh ini. Semoga selalu lancar segala agenda dan sehat selalu.
18	Pelayanan lebih meningkatkan kenyamanan para pengadu dalam kelengkapan administrasi agar ketertiban dapat dilaksanakan, sehingga terhindar dari pungli, diskriminasi, dan lainnya. Petugas pelayanan harus dibekali etika yang baik, kepribadian yang handal untuk menghindari perilaku korupsi





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

19	Sudah baik pelayanan yang diberikan
20	Sudah sangat baik dan cepat respon.. kereen banget MK RI.. Menjadi contoh Lembaga Tinggi Negara lainnya. Terimakasih
21	Semua bagian di MK RI sudah kereen banget.. Terimakasih
22	Semakin ke depan MK sbg lembaga yg bebas dr korupsi
23	Survei Seperti ini Sangat Baik Sebagai Uji Publik Untuk Menakar Kekurangan Kita Kalau Tidak Ada Control Sosial Maka Kita Tidak Tahu Keluh Kesah Dari Pelayanan Yang Kita Persembahkan. Kolaborasi dan Sinergitas Dibutuhkan Saat ini Dalam Mewujudkan Kepuasan Masyarakat, Oleh Rakyat Dari Rakyat dan Untuk Rakyat Sebagaimana Pesan Moral Karaeng Galesong ,Ajariko Picuru Ri Parangnu Tau, yang Artinya Menjadilah Teladan Bagi Masyarakat Karena Saat ini Tidak Sedikit Orang Yang Pintar Memberi Contoh Namun Mereka Sendiri Tidak Bisa Menjadi Contoh Yang Baik Bagi Bangsa dan Negara. Wallahul Muwafiq ILa Aqwamith Tharieq
24	Semoga semua aparat dan stakeholder dapat menjalankan komitmen anti korupsi dengan amanah dan tanpa keberpihakan
25	Saran saya untuk survei persepsi anti korupsi adalah mempertimbangkan kembali apa yang sudah ada dalam pertanyaan survei dan dilaksanakan secara baik sehingga segala macam bentuk kecurangan dapat diminimalisir.
26	Pelu ditingkatkan adanya kerja sama dan prlayanan
27	Teruskan live streaming dalam setiap agenda MK karena hal tsb memudahkan wartawan.
28	saya mengharapkan MK dapat selalu menjadi yang terdepan dalam menegakkan keadilan sebagaimana visi misi MK tersebut dan dapat selalu menjaga komitmen, integritas dan kualitasnya.
29	mohon agar dipermudah bagi insan pers salam kegiatan peliputan, sebagaimana liputan ditempat2 leinnya baik itu lembaga negara ato ngo. untuk mempermudah dan memangkas waktu, terlalu lama jika harus registrasi via online dll
30	Sudah sangat baik
31	Saran supaya bisa diijinkan masuk ruang sidang sebelum sidang dimulai...agar bisa meliput majelis hakim saat memasuki ruang sidang.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

32	Guna peningkatan kegiatan dan persepsi, kegiatan perlu di publikasikan secara luas.
----	---

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan hasil dari Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka rekomendasi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

U1. Diskriminasi pelayanan

Faktor-faktor yang mempengaruhi :

Pertanyaan tidak adanya **diskriminasi pelayanan** yang diberikan oleh **Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol** dijawab tidak setuju, namun alasan yang diberikan “karena biro telah bekerjasama dengan desa dan masyarakat” menjadi tidak sesuai.

Untuk respon terkait “resepsionis cuek sama wartawan. Satpam pelayanan maksimal” faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kompetensi resepsionis dalam memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

Rencana tindak lanjut :

Meskipun terdapat adanya ketidaksesuaian antara pilihan jawaban dengan alasan yang diberikan, namun Biro HP harus terus mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang tidak diskriminatif.

Terkait pelayanan resepsionis yang kurang, akan dilakukan koordinasi dengan unit terkait untuk melakukan evaluasi dan upaya pengembangan kompetensi pelayanan yang dimiliki resepsionis.

Waktu : June 2023

Penanggung jawab : Kepala Biro Humas dan Protokol





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

BAB IV
DATA SURVEI

A. Data Responden

	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Waktu Isi
Responden 1	Laki-Laki	26 - 35 th	S-2 ke atas	Pegawai Swasta	19-05-2023
Responden 2	Perempuan	46 - 55 th	S-2 ke atas	Pegawai Swasta	19-05-2023
Responden 3	Perempuan	46 - 55 th	S-2 ke atas	Lainnya	19-05-2023
Responden 4	Laki-Laki	26 - 35 th	S-2 ke atas	Lainnya	19-05-2023
Responden 5	Laki-Laki	26 - 35 th	S-2 ke atas	Pegawai Swasta	20-05-2023
Responden 6	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	20-05-2023
Responden 7	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	20-05-2023
Responden 8	Perempuan	26 - 35 th	S-1	Lainnya	20-05-2023
Responden 9	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	20-05-2023
Responden 10	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	20-05-2023
Responden 11	Perempuan	16 - 25 th	S-1	Pelajar/Mahasiswa	20-05-2023
Responden	Perempuan	26 - 35 th	S-2 ke atas	Lainnya	20-05-





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

12					2023
Responden 13	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	20-05-2023
Responden 14	Perempuan	56 - 65 th	S-2 ke atas	Pegawai Swasta	20-05-2023
Responden 15	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	20-05-2023
Responden 16	Perempuan	26 - 35 th	S-1	Pegawai Swasta	20-05-2023
Responden 17	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya	20-05-2023
Responden 18	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	20-05-2023
Responden 19	Laki-Laki	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	20-05-2023
Responden 20	Perempuan	46 - 55 th	S-1	PNS/TNI/Polri	20-05-2023
Responden 21	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Pegawai Swasta	21-05-2023
Responden 22	Perempuan	46 - 55 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	22-05-2023
Responden 23	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	22-05-2023
Responden 24	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	22-05-2023
Responden 25	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023
Responden 26	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	PNS/TNI/Polri	22-05-2023





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Responden 27	Perempuan	26 - 35 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	22-05-2023
Responden 28	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023
Responden 29	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	22-05-2023
Responden 30	Perempuan	46 - 55 th	S-1	Pegawai Swasta	22-05-2023
Responden 31	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Pegawai Swasta	22-05-2023
Responden 32	Perempuan	46 - 55 th	S-1	Pegawai Swasta	22-05-2023
Responden 33	Perempuan	56 - 65 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05-2023
Responden 34	Laki-Laki	26 - 35 th	D1-D2-D3-D4	PNS/TNI/Polri	22-05-2023
Responden 35	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Pegawai Swasta	22-05-2023
Responden 36	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	Pegawai Swasta	22-05-2023
Responden 37	Perempuan	46 - 55 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	22-05-2023
Responden 38	Laki-Laki	26 - 35 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	22-05-2023
Responden 39	Laki-Laki	16 - 25 th	SMA	Lainnya	22-05-2023
Responden 40	Perempuan	36 - 45 th	S-2 ke atas	Pegawai Swasta	22-05-2023
Responden	Laki-Laki	46 - 55 th	SMA	Lainnya	22-05-





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

41					2023
Responden 42	Perempuan	46 - 55 th	S-1	Pegawai Swasta	22-05- 2023
Responden 43	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Pegawai Swasta	22-05- 2023
Responden 44	Laki-Laki	36 - 45 th	S-1	PNS/TNI/Polri	22-05- 2023
Responden 45	Perempuan	46 - 55 th	S-2 ke atas	Pegawai Swasta	22-05- 2023
Responden 46	Perempuan	16 - 25 th	SMA	Pelajar/Mahasiswa	22-05- 2023
Responden 47	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya	22-05- 2023
Responden 48	Perempuan	46 - 55 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05- 2023
Responden 49	Laki-Laki	26 - 35 th	S-1	Lainnya	22-05- 2023
Responden 50	Laki-Laki	36 - 45 th	S-2 ke atas	Lainnya	22-05- 2023
Responden 51	Laki-Laki	46 - 55 th	S-1	Pegawai Swasta	22-05- 2023
Responden 52	Perempuan	26 - 35 th	S-2 ke atas	PNS/TNI/Polri	22-05- 2023

*** Data Nama Lengkap, Email dan Nomor Telepon tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaan data responden.*





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

B. Capture Aplikasi Survei

Dalam rangka mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi di Mahkamah Konstitusi, Bapak/Ibu diundang untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini sebagai responden. Kami mengharapkan kejujuran, keterbukaan, dan jawaban yang objektif agar hasil dapat menggambarkan kondisi sesungguhnya.

Kerahasiaan informasi Bapak/Ibu dijamin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jawaban Bapak/Ibu akan diolah secara keseluruhan responden (bukan individu) sehingga tidak akan berdampak pada Bapak/Ibu.

Kami harap Bapak/Ibu bersedia meluangkan waktu sekitar 15-30 menit untuk mengisi survei ini. Partisipasi Bapak/Ibu besar artinya bagi perbaikan organisasi/lembaga ini dan bentuk nyata peran serta Bapak/Ibu dalam upaya mengukur Indeks Persepsi Anti Korupsi di Mahkamah Konstitusi.

Atas kesediaan Saudara kami sampaikan terima kasih dan penghargaan sedalam-dalamnya.
Jika ada yang perlu dikonfirmasi terkait survei ini dapat menghubungi WhatsApp +62 895-3362-29033

Hormat kami,
Tim Survei Persepsi Anti Korupsi

IKUT SURVEI

C. Link Akses Hasil Survei

Link dan barcode untuk validasi hasil Survei:

<https://spak.surveiku.com/validasi-sertifikat/32ad43cb-8a3d-4d6e-ad26-c9c05f570099>

